KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kinerja legislasi berpotensi tak optimal
Tanggal : Sabtu, 12 Desember 2020
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Kinerja Legislasi Berpotensi Tak Optimal

Prolegnas 2021 baru akan ditetapkan pada tahun depan. Ini mengulang keterlambatan penetapan Prolegnas 2020. Keterlambatan berpotensi berimbas pada kinerja legislasi.

JAKARTA, KOMPAS — Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 belum juga ditetapkan hingga masa persidangan DPR tahun ini berakhir. Padahal, penetapan prolegnas oleh DPR bersama pemerintah seharusnya sudah tuntas sebelum tahun berganti. Keterlambatan penetapan prolegnas dikhawatirkan berimbas pada kinerja legislasi. Tidak semua rancangan undang-undang (RUU) yang nantinya diputuskan masuk dalam Prolegnas 2021 bisa dituntaskan pada 2021.

Ketua DPR Puan Maharani dalam pidato yang dibacakannya saat Rapat Paripurna DPR dengan agenda penutupan masa persidangan II DPR tahun 2020/2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12/2020), mengatakan, Prolegnas 2021 masih dibahas. Prolegnas baru akan ditetapkan pada masa persidangan DPR selanjutnya, yang akan dimulai pada 11 Januari 2021.

Ia tidak menyebutkan alasan Prolegnas 2021 belum bisa ditetapkan hingga masa persidangan DPR terakhir pada tahun ini dalam pidatonya. Politikus PDI-P itu hanya meminta agar penyusunan prolegnas mempertimbangkan kemampuan kinerja pembahasan RUU dalam situasi Covid-19 serta prioritas kebutuhan hukum nasional.

Sepanjang 2020, DPR bersama pemerintah telah menetapkan 13 RUU menjadi UU. Jumlah RUU pada Prolegnas 2020 awalnya diputuskan 50 RUU. Namun, di pertengahan tahun, jumlah RUU dikurangi menjadi tinggal 37 RUU. Pengurangan itu karena legislasi terimbas pandemi Covid-19.

Preseden buruk

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan, penetapan prolegnas setiap tahun seharusnya sudah tuntas pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, saat memasuki tahun baru, DPR bersama pemerintah sudah mulai membahas RUU yang ditetapkan masuk dalam prolegnas. Tidak lagi memakan waktu untuk membahas prolegnas.

Keterlambatan penetapan Prolegnas 2021 ini, menurut dia, mengulang keterlambatan serupa saat penetapan Prolegnas 2020. Saat itu, prolegnas baru ditetapkan pada Februari 2020. "Ini menjadi preseden buruk DPR periode ini (2019-2024), ya, karena ini untuk kedua kalinya Prolegnas Prioritas tahunan baru ditetapkan pada tahun yang berjalan," katanya.

Dengan Prolegnas 2021 terlambat ditetapkan, menurut Lucius, berpotensi berimbas pada keterlambatan pembahasan RUU. Ujung-ujungnya, kinerja legislasi tidak optimal. RUU yang masuk dalam prolegnas tidak bisa dituntaskan.

Dalam pembahasan Prolegnas 2021 terakhir, pada 23 November 2020, antara Panitia Kerja Prolegnas 2021 DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, dari 37 RUU yang masuk dalam rancangan Prolegnas 2021, ada 3 RUU yang masih diperdebatkan. Ketiganya ialah RUU Ketahanan Keluarga, RUU Bank Indonesia, dan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Selain itu, perbedaan pendapat terjadi di antara fraksi terkait RUU lain, seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol dan RUU Perlindungan Ulama.

Rapat konsultasi

Sebelumnya, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno, mengatakan, Prolegnas 2021 belum ditetapkan salah satunya karena belum adanya kesepakatan terkait RUU HIP.

Namun, Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi membantah keterlambatan prolegnas karena alotnya perdebatan soal RUU HIP. "Pimpinan DPR masih menginginkan ada rapat konsultasi dengan pemerintah untuk memastikan mana saja RUU yang mau dibahas di 2021," ujarnya.

Konsultasi ini penting, menurut Baidowi, agar Prolegnas 2021 itu benar-benar serius dibahas oleh DPR dan pemerintah. "Jangan sampai seperti yang dulu-dulu atau yang lainnya ketika RUU sudah diusulkan menjadi inisiatif DPR, tetapi pemerintah tidak kunjung menerbitkan surat presiden (surpres)," ujarnya.

(REK)